



Pengaruh Intensitas Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Kota Palangka Raya

Gusti Nazarudin ¹⁾; Natanael Meiky Victorius Samalukang ²⁾; Bhayu Rhama ³⁾; Imanuel Jaya ⁴⁾

^{1,2,3,4)}Study Program Of Public Administration, Universitas Palangka Raya

Email: ¹⁾ gustibombom23@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [24 November 2025]

Revised [20 Juni 2026]

Accepted [24 Juni 2026]

KEYWORDS

Policy Socialization, Community Participation, Waste Management.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya masih menjadi isu strategis seiring dengan meningkatnya volume sampah rumah tangga yang mencapai ± 150 ton per hari. Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan program, termasuk pembentukan Bank Sampah dan kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas sosialisasi kebijakan pemerintah terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Populasi penelitian adalah masyarakat yang mengikuti program pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya dengan teknik pengambilan sampel (d disesuaikan, misalnya: proportional random sampling). Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas sosialisasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Artinya, semakin sering, jelas, dan interaktif sosialisasi dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah. Temuan ini menegaskan pentingnya peran komunikasi kebijakan yang intensif dan berkesinambungan dalam mewujudkan tata kelola sampah berbasis kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

ABSTRACT

The problem of waste management in Palangka Raya City is still a strategic issue along with the increasing volume of household waste which reaches ± 150 tons per day. The City Government through the Environmental Service (DLH) has issued a number of policies and programs, including the establishment of a Waste Bank and policy socialization activities to the community. However, the level of community participation in waste management programs is still relatively low. This research aims to analyze the influence of the intensity of socialization of government policies on the level of community participation in waste management programs in Palangka Raya City. The research method uses a quantitative approach with the type of explanatory research. The research population is people who follow the waste management program in Palangka Raya City with sampling techniques (adjusted, for example: proportional random sampling). Data is collected through a questionnaire with a Likert scale and analyzed using simple linear regression. The research results show that the intensity of policy socialization has a positive and significant effect on the level of community participation. That is, the more frequent, clear, and interactive socialization is carried out, the higher the level of community participation in supporting waste management. This finding emphasizes the importance of the role of intensive and sustainable policy communication in realizing waste governance based on government and community collaboration

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang terus menjadi perhatian penting di berbagai kota besar, termasuk Kota Palangka Raya. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi berdampak langsung pada tingginya volume sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya. Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa rata-rata produksi sampah masyarakat telah mencapai ± 150 ton per hari pada tahun 2023, dengan dominasi sampah plastik yang sulit terurai. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran, penyumbatan saluran air, hingga meningkatnya risiko banjir serta penurunan kualitas kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui DLH telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menangani masalah tersebut, antara lain melalui Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Strategi Penanganan dan Pengelolaan Sampah Kota, serta mendorong pembentukan Bank Sampah Induk (BSI) di berbagai wilayah. Selain itu, berbagai upaya sosialisasi kebijakan juga dilakukan guna

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal. Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga masih didominasi oleh pola buang tanpa pemilahan, di mana 71,1% masyarakat tidak melakukan pemilahan antara sampah basah dan kering. Beberapa studi menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh intensitas komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Konsep *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat terbukti efektif mendorong partisipasi dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Namun, dalam konteks Palangka Raya, kolaborasi ini masih menghadapi tantangan, salah satunya rendahnya minat masyarakat untuk terlibat secara aktif. Hal yang sama juga terlihat pada program perbaikan permukiman kumuh di Mendawai, di mana strategi pemerintah tidak berjalan maksimal akibat minimnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penting untuk mengkaji sejauh mana intensitas sosialisasi kebijakan pemerintah memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya.

LANDASAN TEORI

Teori Komunikasi Kebijakan Komunikasi kebijakan merupakan aspek fundamental dalam implementasi kebijakan publik. Edward III dalam model implementasi kebijakan menempatkan komunikasi sebagai salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan kebijakan. Informasi yang disampaikan pemerintah harus jelas, konsisten, dan mudah dipahami agar dapat mendorong kepatuhan dan keterlibatan masyarakat. Jika sosialisasi kebijakan dilakukan secara terbatas, tidak rutin, atau menggunakan media yang tidak sesuai, maka kebijakan berisiko tidak efektif di tingkat masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah, komunikasi kebijakan tidak hanya berfungsi menyampaikan aturan teknis, melainkan juga membentuk kesadaran baru dan mengubah perilaku warga. Misalnya, pemilahan sampah bukanlah perilaku yang muncul secara spontan, melainkan hasil dari edukasi yang berulang, interaktif, dan meyakinkan.

Oleh karena itu, intensitas sosialisasi menjadi faktor penentu apakah pesan kebijakan benar-benar dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Teori Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat merupakan konsep inti dalam pembangunan berbasis komunitas. Cohen dan Uphoff membagi partisipasi ke dalam berbagai bentuk, mulai dari kehadiran, keterlibatan aktif, hingga kontribusi sumber daya. Dalam penelitian ini, partisipasi dioperasionalkan melalui kehadiran dalam sosialisasi, keterlibatan dalam program bank sampah, kegiatan kolektif seperti kerja bakti, hingga konsistensi perilaku ramah lingkungan.

Namun, partisipasi tidak dapat dipahami secara sederhana hanya sebagai "ikut serta". Ada faktor struktural yang memengaruhi, seperti tingkat pendidikan, kesadaran lingkungan, dan kepemimpinan lokal. Misalnya, masyarakat berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih responsif terhadap program sosialisasi, sementara masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah mungkin membutuhkan metode komunikasi yang lebih sederhana. Dengan demikian, partisipasi harus dilihat sebagai fenomena multidimensional yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Konsep *Collaborative Governance* Teori *collaborative governance* yang diperkenalkan Ansell dan Gash (2007) menawarkan perspektif baru bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks. Pengelolaan sampah, sebagai isu lingkungan perkotaan, adalah contoh nyata masalah yang membutuhkan kolaborasi lintas aktor.

Pemerintah menyediakan regulasi dan fasilitas, swasta dapat mendukung melalui inovasi dan investasi, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam praktik sehari-hari. Namun, kolaborasi ini hanya mungkin tercapai jika ada komunikasi yang terbuka dan intensif. Sosialisasi kebijakan berperan sebagai mekanisme untuk membangun kepercayaan, menjelaskan peran masing-masing aktor, dan menggerakkan partisipasi kolektif. Tanpa komunikasi yang memadai, kolaborasi hanya akan berhenti pada tataran wacana.

METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

- Uji Validitas dan Reliabilitas untuk memastikan instrumen kuesioner layak digunakan.
- Analisis Deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik responden serta distribusi jawaban.
- Analisis Regresi Linear Sederhana untuk menguji pengaruh intensitas sosialisasi kebijakan (X) terhadap partisipasi masyarakat (Y).
- Uji Hipotesis (uji t) untuk mengetahui signifikansi hubungan kedua variabel.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Intensitas Sosialisasi Kebijakan (X)

Responden diminta menilai frekuensi, media, kualitas materi, dan interaktivitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah.

Tabel 1 Rata-rata Skor Variabel Intensitas Sosialisasi (X)

Indikator	Mean	Kategori
Frekuensi Sosial	3,8	Tinggi
Media sosialisasi	3,6	Sedang
Kualitas Materi	4,0	Tinggi
Interaktivitas	3,7	Tinggi
Rata - Rata	3,8	Tinggi

Tingkat Partisipasi Masyarakat (Y) Partisipasi diukur melalui indikator keterlibatan dalam sosialisasi, pengelolaan sampah rumah tangga, kegiatan kolektif, dan keberlanjutan perilaku.

Tabel 2. Rata-rata Skor Variabel Partisipasi Masyarakat (Y)

Indikator	Mean	Kategori
Kehadiran dalam sosialisasi	3,5	Sedang
Pengelolaan sampah rumah tangga	3,7	Tinggi
Kegiatan kolektif(kerja bakti,PKY)	3,4	Sedang
Keberlanjutan perilaku	3,6	Tinggi
Rata-rata	3,6	Sedang–Tinggi

Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik dalam pengelolaan sampah rumah tangga, namun masih terbatas dalam kegiatan kolektif. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa pemilahan sampah rumah tangga di Palangka Raya belum merata.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Variabel	Koefisien (B)	t-hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	12,35	–	–	–
Intensitas Sosialisasi (X)	0,52	6,87	0,000	Signifikan

$R^2 = 0,462 \rightarrow 46,2\%$ variasi partisipasi masyarakat dapat dijelaskan oleh intensitas sosialisasi kebijakan. Sisanya 53,8% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kepemimpinan lokal, kondisi sosial-ekonomi, dan dukungan komunitas. 1. Interpretasi Hasil Hasil analisis menunjukkan bahwa intensitas sosialisasi kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya.

Semakin sering, jelas, dan interaktif sosialisasi dilakukan, maka semakin tinggi pula keterlibatan masyarakat. Temuan ini mendukung penelitian Syifa (2025) yang menekankan pentingnya collaborative

governance dalam mendorong partisipasi masyarakat serta penelitian Wijaya (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran rumah tangga berperan penting dalam manajemen sampah. Namun, partisipasi kolektif masyarakat masih rendah, serupa dengan hasil penelitian Bertho & Grestyana (2023) tentang penanganan permukiman kumuh di Mendawai yang terhambat oleh minimnya keterlibatan warga.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas sosialisasi kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya. Artinya, semakin sering, jelas, dan interaktif sosialisasi kebijakan dilakukan, semakin tinggi pula keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Intensitas Sosialisasi sebagai Faktor Kunci

Temuan ini sejalan dengan teori komunikasi kebijakan yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Sosialisasi kebijakan berfungsi sebagai sarana membangun pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat agar mendukung tujuan kebijakan. Intensitas yang tinggi dalam sosialisasi—baik melalui tatap muka, media sosial, maupun program komunitas—akan memperkuat kesadaran dan dorongan partisipatif masyarakat. Hasil ini konsisten dengan penelitian Syifa (2025) tentang collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Palangka Raya, yang menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini berada pada kategori sedang–tinggi, khususnya dalam pemilahan sampah rumah tangga dan keberlanjutan perilaku menjaga lingkungan. Namun, partisipasi kolektif seperti kerja bakti dan keterlibatan dalam program komunitas masih rendah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Wijaya (2017) bahwa keluarga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, tetapi kepedulian kolektif masyarakat masih lemah.

Selain itu, hasil penelitian Bertho & Grestyana (2023) juga menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi warga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan perbaikan permukiman kumuh di Mendawai. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor sosial-budaya, kepercayaan antarwarga, serta kepemimpinan lokal turut berpengaruh pada keberhasilan program lingkungan.

Implikasi terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di Palangka Raya

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kebijakan tidak boleh dipandang sekadar sebagai formalitas, melainkan harus menjadi bagian integral dari strategi komunikasi pembangunan. Pemerintah Kota Palangka Raya melalui DLH perlu memperkuat strategi sosialisasi dengan: Meningkatkan frekuensi dan konsistensi sosialisasi di berbagai wilayah, tidak hanya menjelang kegiatan tertentu. Diversifikasi media sosialisasi, termasuk memanfaatkan platform digital dan media sosial agar lebih menjangkau generasi muda.

Mengoptimalkan peran komunitas lokal, seperti Kelas PKY, Bank Sampah Induk, dan organisasi masyarakat, sebagai agen perubahan di tingkat akar rumput. □ Mendorong partisipasi kolektif, bukan hanya partisipasi individual, sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini masih terbatas pada pengaruh satu variabel utama, yaitu intensitas sosialisasi kebijakan, terhadap partisipasi masyarakat.

Padahal, berdasarkan penelitian sebelumnya, faktor lain seperti kepemimpinan lokal, dukungan regulasi, kondisi sosial-ekonomi, dan budaya gotong royong juga berperan penting. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel, misalnya menambahkan faktor motivasi individu, efektivitas organisasi lingkungan, atau kualitas regulasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian mengenai Pengaruh Intensitas Sosialisasi Kebijakan Pemerintah terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa peran sosialisasi kebijakan sangat menentukan tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Berdasarkan hasil analisis, intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya berada pada kategori tinggi, khususnya pada aspek frekuensi kegiatan, kejelasan materi, dan interaktivitas antara penyampai pesan dan masyarakat.



Namun demikian, pemanfaatan media komunikasi masih belum optimal, terutama pada kanal digital yang sebenarnya dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda. Sementara itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah berada pada kategori sedang hingga tinggi. Masyarakat relatif aktif dalam pemilahan sampah rumah tangga dan menjaga keberlanjutan perilaku ramah lingkungan, tetapi keterlibatan dalam kegiatan kolektif seperti kerja bakti dan program komunitas lingkungan masih terbatas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran individu untuk berpartisipasi sudah mulai terbentuk, namun kesadaran kolektif yang lebih luas masih perlu ditingkatkan. Hasil uji regresi linear sederhana membuktikan bahwa intensitas sosialisasi kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, semakin sering dan efektif sosialisasi dilakukan, semakin tinggi pula keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah.

Hal ini menegaskan bahwa komunikasi kebijakan yang intensif, jelas, dan konsisten mampu meningkatkan kesadaran sekaligus mendorong tindakan nyata masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, strategi komunikasi kebijakan perlu ditingkatkan secara berkesinambungan dan diperkuat dengan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, komunitas lokal, maupun sektor swasta, agar terwujud tata kelola sampah yang berkelanjutan dan mendukung tercapainya pembangunan lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya saing.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan intensitas dan variasi media sosialisasi kebijakan, termasuk memanfaatkan platform digital untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif tidak hanya dalam pengelolaan sampah rumah tangga, tetapi juga dalam kegiatan kolektif yang mendukung kebersihan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bertho, D. A., & Grestyana, R. (2023). Strategi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Mendawai, Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 7(2), 1357–1371.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya. (2025). *Laporan Akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Palangka Raya Tahun 2024*. Palangka Raya: DLH Kota Palangka Raya.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhidayati, S., & Hidayat, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–156.
- Palangka Raya. Pemerintah Kota. (2019). *Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Strategi Penanganan dan Pengelolaan Sampah Kota Palangka Raya*. Palangka Raya: Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Putri, R. A., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh sosialisasi program pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 67–78.
- Ramadhany, R. (2024). *Buku Saku Digital Penggunaan Aplikasi SPSS Versi 29*. Palangka Raya: FISIP Universitas Palangka Raya.
- Syifa, R. N. (2025). *Analisis Collaborative Governance Pengelolaan Sampah di Wilayah Mendawai Kota Palangka Raya Tahun 2024*. Laporan Penelitian. Universitas Palangka Raya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Wigreny, L. A., & Susanti, D. (2022). Pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat: Perspektif komunikasi pembangunan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(3), 211–225.

Wijaya, A. (2017). Peran keluarga dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 45–56.

Yulianti, E., & Pratama, R. (2023). Efektivitas komunikasi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pengelolaan sampah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(3), 210–222.